

BAB V

PENUTUP

Perang dagang yang terjadi pada Amerika Serikat dengan mitra dagang utamanya China, diawali dengan Tindakan Donald Trump yang menaikkan tarif bea masuk secara illegal dalam beberapa produk dari China. Tindakan yang dilakukan oleh Donald Trump sangat bertentangan dengan tujuan yang didirikan oleh WTO salah satunya untuk menjamin keamanan bagi pedagang dan para pebisnis internasional dalam menjalankan kegiatannya. Dengan Tindakan Amerika Serikat menaikkan tarif secara sepihak juga melanggar dua prinsip utama yang ada pada WTO yaitu prinsip proteksi melalui tarif dan prinsip pengikatan tarif. Dalam permasalahan ini WTO sangat berpengaruh penting dalam menyelesaikan permasalahan sengketa yang terjadi antara kedua negara.

Jika dilihat dari penjelasan diatas hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa WTO merupakan salah satu rezim dalam menyelesaikan masalah sengketa dagang yang ada di anggota WTO. Dalam mengharmonisasikan hubungan dagang AS dan China masih banyak kelemahan yang terlihat dari mekanisme penyelesaian di WTO, Selain itu juga karena Amerika Serikat yang memberikan dominasi besar kepada WTO terutama dalam bidang ekonomi serta perdagangan yang membuat peran WTO sebagai rezim menjadi tidak maksimal untuk menjadi sebagai penengah didalam permasalahan ini. Untuk menghadapi tantangan perdagangan internasional, WTO perlu lebih memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa dan memperluas perannya dan semakin memperkuat konsep

rezim perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kestabilan diantara negara anggota WTO.

Penulis disini dapat menyimpulkan bahwa dalam kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan China sejauh ini dapat dikatakan belum optimal. Dalam kasus ini WTO membutuhkan waktu yang sangat lama yang harus dihabiskan, pada tahun 2020 sampai tahun 2021 penyelesaian yang dilakukan oleh DSB mengalami kerumitan dan penundaan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 global, namun sampai saat ini WTO hanya berhasil membentuk satu panel dari ketiga kasus yang sudah dilaporkan dari tahun 2019. Kedua kasus sengketa yang bernomor DS565 dan DS587 masih ditahap pengajuan konsultasi dan sampai tahun ke 5 konflik yang terjadi masih belum ada hasil pembentukan panel.

